

**Strategi Pengembangan Pengelolaan Kemitraan Konservasi
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu**

**Development Strategy for Community-Based Conservation Partnership
Management in Lore Lindu National Park**



SARON MELISA SOMBA

M012221006

PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEMITRAAN
KONSERVASI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU**

SARON MELISA SOMBA

M012221006



**PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



**DEVELOPMENT STRATEGY FOR COMMUNITY-BASED
CONSERVATION PARTNERSHIP MANAGEMENT
IN LORE LINDU NATIONAL PARK**

SARON MELISA SOMBA

M012221006



**FORESTRY SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF FORESTRY
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR, INDONESIA
2024**



HALAMAN PENGAJUAN

**STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEMITRAAN
KONSERVASI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU**

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

SARON MELISA SOMBA
M012221006

kepada

**PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEMITRAAN
KONSERVASI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU**

SARON MELISA SOMBA

M012221006

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada 22 Oktober 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

**Program Studi Ilmu Kehutanan
Departemen Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin
Makassar**

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP
NIP. 19700918 199702 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Kehutanan,

in, S.Hut., MP., Ph.D
780209 200812 1 001

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc
NIP. 19600330 198811 1 001

Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin,



Dr. A. Muryahid M, S.Hut., MP
NIP. 19690208 199702 1 002




PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEMITRAAN KONSERVASI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Prof. Dr. Supratman, S.Hut.,MP sebagai Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 November 2024




SARON MELISA SOMBA
NIM. M012221006



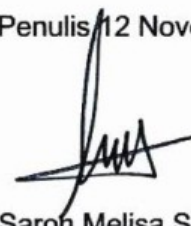
UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan Tesis ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP sebagai Pembimbing Utama, Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc sebagai Pembimbing pendamping. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Bersama ini saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc, Dr. A. Mujetahid M, S.Hut., MP dan Dr. Ir. Sitti Nuraeni, MP yang telah bersedia menjadi Panitia Penilai dalam Penyusunan Tesis ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Prodi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh program megister serta para dosen.

Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Pihak Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian di lapangan, dan kepada Dr. Sudirman Dg Massiri S.Hut., M.Sc dari kalangan akademisi, Cesar A. M., S.Hut., M.Sc dari pihak TNLL, Alfianus, SP dari LPKD dan Yudha Prakasa, S.Tr.Par., M.Par dari Akademisi atas kesedian menjadi Pakar dalam bantuan penyusunan hasil penelitian ini. Terimakasih saya sampaikan kepada Anggota LPKD desa Bobo, Desa Bunga dan Desa Karunia yang telah bersedia menjadi narasumber.

Akhirnya, kepada kedua orang tua tercinta saya mengucapkan limpah terima kasih atas doa, pengorbanan dan motivasi mereka selama saya menempuh pendidikan. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada Kakak-kakak saya dan seluruh keluarga atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai.

Penulis 12 November 2024



Saron Melisa Somba



ABSTRAK

SARON MELISA SOMBA. **Strategi pengembangan pengelolaan kemitraan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu** (dibimbing oleh Prof. Dr. Supratman, S.Hut.,MP, dan Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc).

Wilayah perbatasan antara desa dan kawasan hutan sering menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan. Namun, sejumlah faktor seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya ketepatan program pemberdayaan telah menjadi hambatan utama. Stigma negatif terhadap masyarakat sebagai penghancur hutan semakin menghambat upaya pemerintah. Kemitraan konservasi muncul sebagai solusi potensial dengan fokus pada pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Namun, penerapan kemitraan konservasi di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) mengalami kesulitan dalam menjaga keberlanjutan program karena kurangnya komitmen dan hasil pemberdayaan masyarakat yang belum memuaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dan merumuskan strategi untuk meningkatkannya. Analisis data menggunakan Force Field Analysis (FFA) menunjukkan faktor pendorong seperti dukungan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, dan kemitraan dengan pihak luar, serta faktor penghambat seperti kurangnya partisipasi aktif masyarakat, keterampilan dan kapasitas yang rendah, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Melalui Analytical Hierarchy Process (AHP), dirumuskan strategi termasuk peningkatan efektivitas lembaga, penguatan kemitraan dengan pihak luar, serta peningkatan pemantauan dan evaluasi program. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi di TNLL masih memerlukan perhatian serius, dengan fokus pada perbaikan aspek kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi serta kemitraan dengan pihak eksternal.

Kata kunci: Kemitraan konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Strategi pengembangan, FFA, AHP



ABSTRACT

SARON MELISA SOMBA. **Development Strategies for Conservation Partnership Management Based on Community Empowerment in Lore Lindu National Park** (supervised by Prof. Dr. Supratman, S.Hut.,MP, and Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc).

The border areas between villages and forest regions often become the main focus of local governments in reducing poverty. However, several factors such as limited community access to forest resources, low human resource capacity, and the lack of accuracy in empowerment programs have become major obstacles. The negative stigma against the community as forest destroyers further hampers government efforts. Conservation partnerships emerge as a potential solution with a focus on community development and environmental preservation. However, the implementation of conservation partnerships in Lore Lindu National Park (LLNP) faces difficulties in maintaining program sustainability due to a lack of commitment and unsatisfactory community empowerment outcomes. This research aims to identify the barriers in maintaining the sustainability of community empowerment programs and formulate strategies to improve them. Data analysis using Force Field Analysis (FFA) shows driving factors such as budget support, increased human resource capacity, and partnerships with external parties, as well as inhibiting factors such as lack of active community participation, low skills and capacity, and lack of coordination between agencies. Through the Analytical Hierarchy Process (AHP), strategies are formulated including improving institutional effectiveness, strengthening partnerships with external parties, and enhancing program monitoring and evaluation. Overall, community empowerment through conservation partnerships in LLNP still requires serious attention, focusing on improving institutional aspects and increasing coordination between agencies as well as partnerships with external parties.

Keywords: Conservation partnership, Community empowerment, Development strategy, FFA, AHP



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	2
1.3. Tujuan dan Manfaat	2
1.4. Kerangka Pikir Penelitian	3
BAB II METODE PENELITIAN	4
2.1. Tempat dan Waktu	4
2.2. Teknik Pengumpulan Data	5
2.2.1. Menganalisis kondisi terkini pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan konservasi	5
2.2.2. Menganalisis Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Kemitraan Konservasi dan merumuskan Strategi pengembangan Pemberdayaan Masyarakat melalui skema kemitraan konservasi	5
2.3. Pelaksanaan Penelitian	8
2.3.1. Data Primer	8
2.3.2. Data Sekunder	9
2.4. Parameter Penelitian	9
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	11
3.1. Gambaran kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kemitraan konservasi di Taman Nasional Lore Lindu	11
3.1.1. Deskripsi program pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu	11
3.1.2. Implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kemitraan konservasi di TNLL	15
3.2. Analisis faktor Pendorong dan Penghambat pengelolaan kemitraan konservasi dan prospek implementasi pemberdayaan masyarakat di TNLL	16
3.2.1. Analisis Faktor Pendorong (<i>driving force</i>) dan faktor Penghambat (<i>restraining force</i>) pengelolaan kemitraan konservasi	22
3.2.2. Analisis Faktor Pendorong	24
3.2.3. Analisis Faktor Penghambat	31



3.3. Strategi Pengembangan pengelolaan kemitraan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	50
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Studi Kasus tiga desa penyangga di BPTN Wilayah II Makmur	4
Tabel 2. Kondisi sekarang pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi	5
Tabel 3. Inventarisasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan kemitraan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat.....	6
Tabel 4. Cara memperkuat faktor pendorong dan menghambat faktor penghambat pengelolaan kemitraan konservasi	6
Tabel 5. Skala Saaty (1980)	7
Tabel 6. Nilai Pembangkit Random (RI).....	8
Tabel 7. Variabel dan indikator penelitian pengelolaan kemitraan konservasi	10
Tabel 8. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	21
Tabel 9. Inventarisasi Faktor-faktor Pendorong dan Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Kemitraan Konservasi	23
Tabel 10. Cara memperkuat faktor pendorong dan menghambat faktor penghambat pengelolaan kemitraan konservasi	41
Tabel 11. Hasil Dynamic Gabungan <i>Expert Choice</i>	46
Tabel 12. Hasil Analisis AHP berupa Nilai Bobot Kriteria Gabungan 3 pakar Menggunakan Model Ideal .	47
Tabel 13. Strategi pengembangan pengelolaan kemitraan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	3
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian	4
Gambar 3. Alur Penelitian	5
Gambar 4. Bagan Force Field Analysis	6
Gambar 5. Hierarki Keputusan AHP	7
Gambar 6. Kegiatan pertemuan anggota kelompok	25
Gambar 7. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anggota kelompok	26
Gambar 8. Pembuatan Kompos oleh anggota kelompok	27
Gambar 9. Persemaian tanaman anggrek.....	27
Gambar 10. Alat Pemecah Kemiri.....	28
Gambar 11. Alat Tungku membuat gula aren	28
Gambar 12. Witsa alam desa Karunia	29
Gambar 13. Hasil unit usaha bubuk Kemiri	30
Gambar 14. Pertemuan penyusunan program kerja	30
Gambar 15. Hierarki Proses AHP	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Pengelolaan Kemitraan Konservasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu.	54
Lampiran 2. Hasil Penilaian Kuesioner Force Field Analysis.....	56
Lampiran 3. Hasil Pengisian Kuesioner Matriks perbandingan berpasangan.	59
Lampiran 4. Hasil Analisa Penilaian Pakar Menggunakan Expert Choice.....	93
Lampiran 5. Daftar Anggota Kelompok LPKD	101
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian	102



DAFTAR SINGKATAN

AD-ART	: Aturan Dasar- Aturan Rumah Tangga
AHP	: Analytic Hierarchy Process
APL	: Areal Penggunaan Lain
BBTNLL	: Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu
BPTN	: Bidang Pengelola Taman Nasional
CI	: Consistency Index
CR	: Consistency Ratio
FFA	: Force Field Analysis
FP3	: Forest Programme III
GIS	: Geographic Information System
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
KTH	: Kelompok Tani Hutan
LPKD	: Lembaga Pengelola Konservasi Desa
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MOU	: Memorandum of Understanding
n	: nilai
NIB	: Nomor Induk Berusaha
Perdes	: Peraturan Desa
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kementerian Kehutanan
RI	: Ratio Index
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RPP	: Rencana Pelaksanaan Program
SPTN	: Seksi Pengelola Taman Nasional
SDA	: Sumber Daya Alam
SDH	: Sumber Daya Hutan
SDM	: Sumber Daya Manusia
TN	: Taman Nasional
TNLL	: Taman Nasional Lore Lindu



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengurangi kemiskinan, terutama di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan. Kawasan hutan tidak dapat dipisahkan dari ancaman dan permasalahan dalam pengelolaannya. Ketergantungan yang tinggi dari masyarakat pada sumber daya hutan selalu dikaitkan dengan masalah kerusakan hutan yang terjadi (Hajjar *et al.* 2013). Santosa mengemukakan dalam Ristianasari (2013) bahwa mayoritas masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi adalah masyarakat dalam kategori kurang mampu. Kemiskinan yang banyak dialami oleh masyarakat pedesaan, terutama di sekitar kawasan konservasi, adalah masalah yang perlu segera diatasi. Hambatan utama yang mereka hadapi adalah keterbatasan akses dan kurangnya kemampuan masyarakat, yang menghalangi kemandirian mereka dan menyebabkan konflik dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perubahan strategi dalam pengelolaan kawasan konservasi, di mana peran pengelola tidak hanya terbatas pada pengelolaan kawasan, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan pendukung dalam memperkuat kapasitas masyarakat.

Model pengelolaan kawasan Konservasi terus mengalami perkembangan dalam hal tujuan pengelolaan, status masyarakat, Manajemen dan pendanaan. Konsep pengelolaan konservasi terkini menekankan pada pengelolaan kawasan konservasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi pemangku kepentingan, termasuk mereka yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Salah satu Skema terbaru dalam pengelolaan hutan termasuk pengelolaan Kawasan konservasi disebut sebagai skema kemitraan konservasi, yaitu mengedepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta kepentingan pelestarian Kawasan (Hartoyo, *et al.* 2020).

Kebijakan kemitraan hutan di Indonesia, terutama kemitraan konservasi, didasarkan pada dua regulasi pemerintah: kebijakan perhutanan sosial dalam Peraturan Menteri LHK No. P.83/MENLHK/SET/KUM.1/10/2016, dan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam Peraturan Menteri LHK No. P.43/MENLHK/SET/KUM.1/6/2017. Secara operasional, pelaksanaan kemitraan konservasi diatur melalui Peraturan Direktur Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang panduan teknis kemitraan konservasi di kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang mencakup tiga aspek utama: (a) kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat; (b) Kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem; serta (c) pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kemitraan konservasi.

Berdasarkan tinjauan kebijakan, kemitraan konservasi yang diterapkan dalam pengelolaan kawasan konservasi bertujuan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan dengan memberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Dalam kerjasama ini, masyarakat diberikan hak legal untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, melakukan budidaya tradisional, berburu jenis satwa yang tidak dilindungi, serta memanfaatkan sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. Akses ini juga mencakup pemanfaatan terbatas di area konservasi. Di sisi lain, kemitraan konservasi untuk pemulihan ekosistem bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekosistem yang rusak akibat aktivitas manusia dan faktor alam di kawasan konservasi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi ekosistem ke kondisi aslinya atau mendekati keadaan semula. Karena itu, kemitraan ini fokus pada area rehabilitasi atau wilayah yang mengalami kerusakan. (Massiri, 2019). Skema ini juga menjadi strategi untuk mengatasi konflik antara masyarakat lokal yang menggunakan sumber daya hutan dan pengelola kawasan konservasi.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi merupakan juga sebuah proses yang pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang mendukung kelestarian kawasan konservasi, sebagaimana tercantum dalam



lingkungan Hidup dan Kehutana, bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat pada i meliputi 1) pengembangan desa konservasi, 2) pemberian akses dalam r daya hutan, 3) fasilitasi kemitraan, 4) pemberian izin perusahaan jasa wisata gunan pondok wisata.

3) menyatakan bahwa penerepan kegiatan pemberdayaan masyarakat di suatu t karakter masyarakat yang berada dalam sebuah wilayah tersebut. Pendekatan berdayaan yaitu masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai program

pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan yang dilakukan untuk masyarakat itu sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang direncanakan untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki secara terstruktur dan berkerjasama sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial (Mardikanto dan Soebiato, 2015).

Pemberdayaan masyarakat memerlukan rencana dan strategi agar kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang mendukung kelestarian kawasan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan bukan sekedar program yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan, tetapi suatu kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memperkuat kelembagaan, mengubah sikap dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan konservasi. Jika tidak, pemberian akses dapat menimbulkan ancaman terhadap sumber daya hutan di dalam kawasan konservasi (Massiri, 2022). Program yang dimulai dengan peningkatan kesadaran masyarakat tetapi gagal memberikan kendali yang lebih besar atas sumber daya juga menimbulkan masalah (Sen, 1997).

Hasil laporan penilaian kebutuhan LPKD TNLL (2022) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di beberapa desa belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam hal pelestarian kawasan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Beberapa desa menunjukkan penurunan kegiatan pada areal pengelolaan kemitraan konservasi, utamanya pada kegiatan jejaring dan kerja sama. Selain itu lembaga pengelola konservasi desa juga sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan kegiatan monitoring evaluasi tidak berkala lagi dilakukan. Hasil laporan juga menunjukkan bahwa sebagian besar unsur-unsur kegiatan pengelolaan kemitraan konservasi menunjukkan hasil yang belum memadai meskipun beberapa desa masih aktif berpartisipasi pada kegiatan pengelolaan kemitraan konservasi. Namun, belum dianggap cukup karena jika semua desa ikut berpartisipasi, maka hasil yang didapatkan tentu akan sangat memadai untuk mendukung pelestarian kawasan konservasi dan dalam meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat.

Massiri (2022) mengatakan bahwa Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola TNLL sudah sering dilakukan bahkan hampir setiap tahun. Akan tetapi, program kegiatan ini belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kapasitas dan ekonomi masyarakat, termasuk juga peningkatan dukungan masyarakat bagi kelestarian fungsi kawasan TNLL dan tidak berkelanjutan dan terarah. Mengingat kelemahan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di TNLL yaitu Sulitnya mempertahankan kelangsungan program mengakibatkan kurangnya kesinambungan dalam pelaksanaannya, padahal kesinambungan program adalah inti dari efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kuncoro, 2004). Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan Kemitraan Konservasi maka penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kembali faktor-faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kemudian hasil analisis ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan strategi pengembangan pengelolaan kemitraan konservasi di TNLL kedepanya

1.2. Perumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan sulitnya menjaga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat inilah maka perlu melakukan penelitian untuk mengetahui langkah-langkah atau strategi yang dapat diterapkan guna mendukung upaya pengembangan pengelolaan kemitraan konservasi. Secara spesifik dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kemitraan konservasi di TNLL?
2. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan konservasi di TNLL berdasarkan faktor pendorong (*driving forces*) dan faktor penghambat (*restraining forces*)?



infaat

1 masalah tersebut maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: asi program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kemitraan konservasi. faktor pendorong (*driving forces*) dan faktor penghambat (*restraining forces*) kemitraan konservasi.

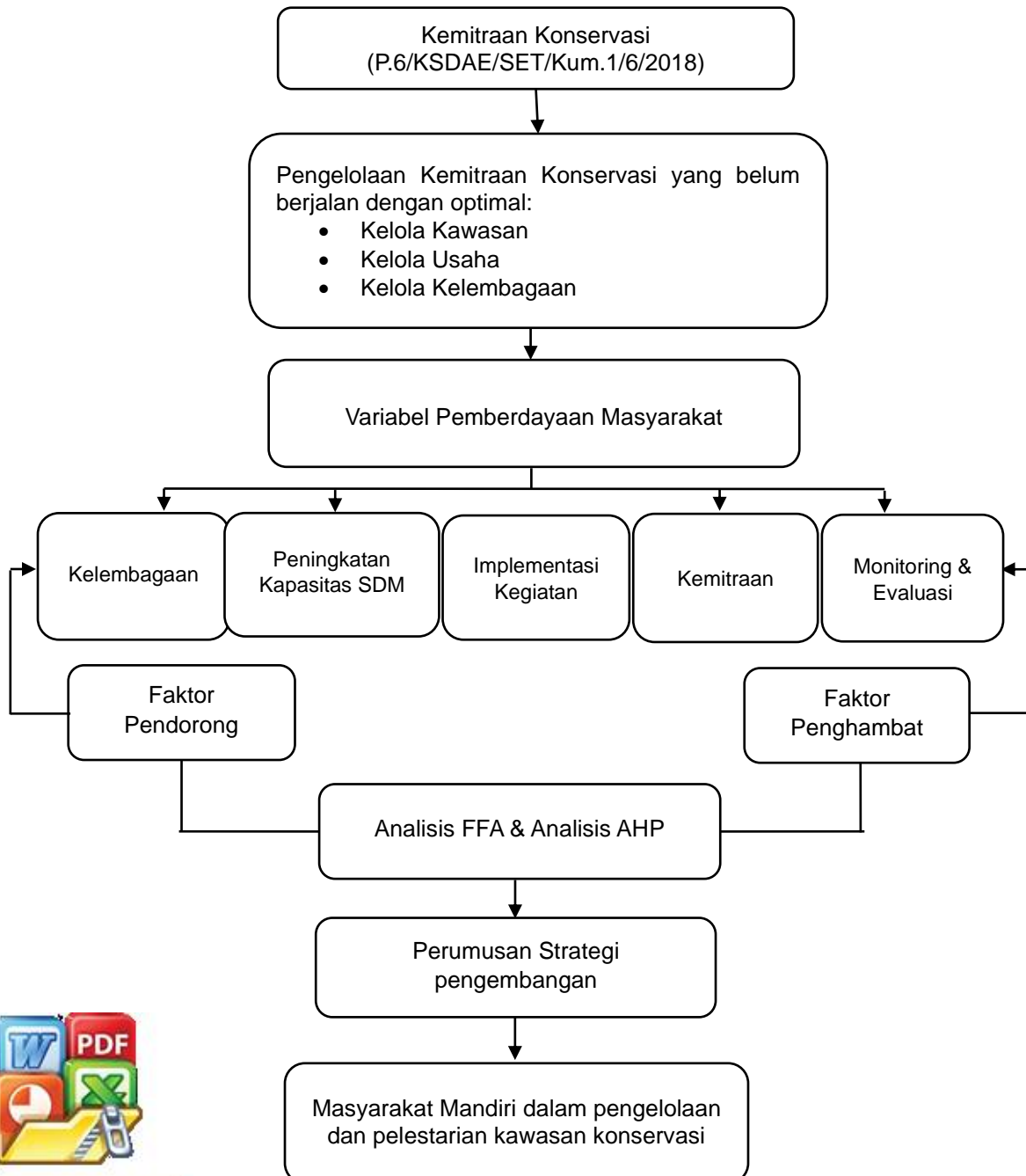
3. Merumuskan strategi pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan konservasi di TNLL.

Sehingga manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan sumber informasi untuk strategi dalam pengelolaan kemitraan konservasi sehingga dapat mengedepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta kepentingan pelestarian Kawasan,
2. Sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk dijadikan rujukan dalam penyusunan atau penelitian terkait pengelolaan kemitraan konservasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merencanakan, merumuskan dan menyusun regulasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat

1.4. Kerangka Pikir Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah menyusun strategi pengelolaan kawasan konservasi di TNLL sebagai upaya pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan konservasi. Adapun kerangka pikir dalam menyusun penelitian ini disajikan pada Gambar 1:



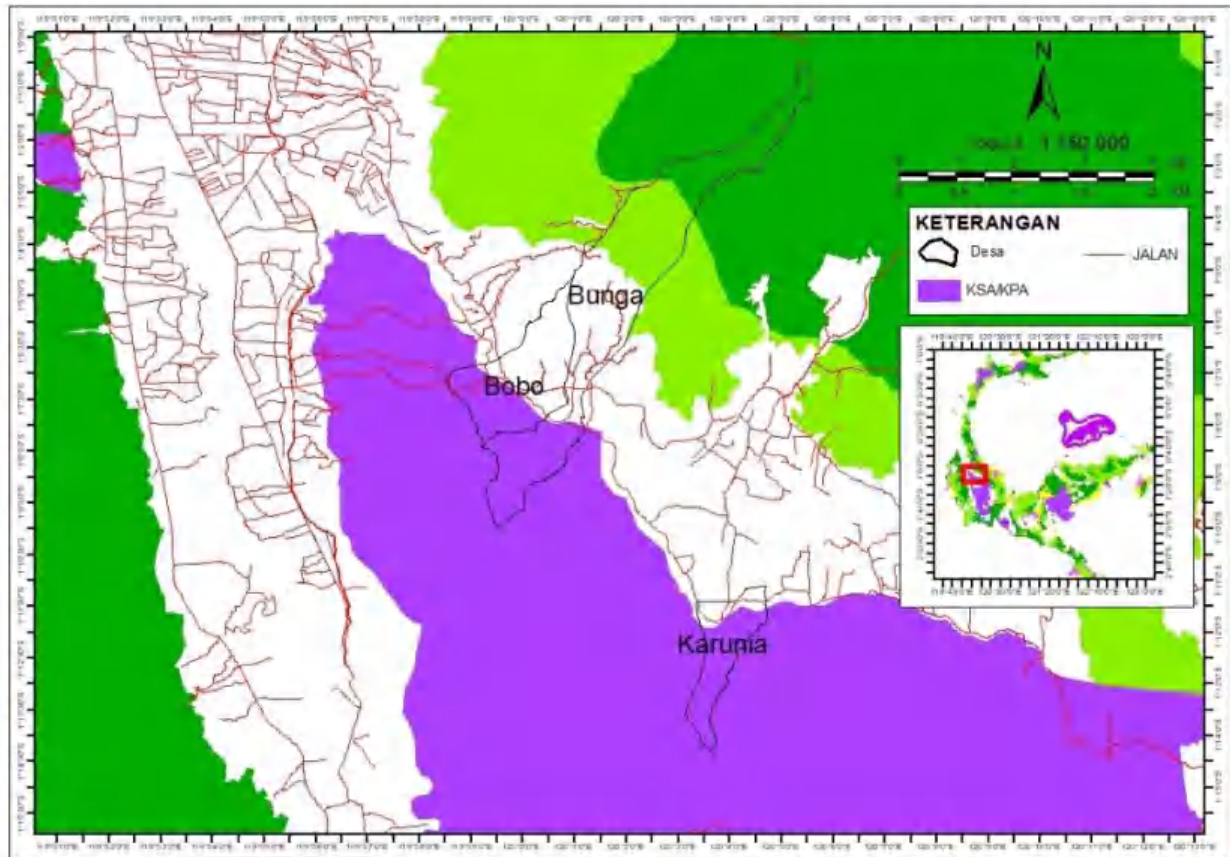
Gambar 1. Kerangka Berpikir



BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di tiga desa yang terletak di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Area ini merupakan bagian dari Kemitraan Konservasi yang berada di bawah wilayah kerja BPTN Wilayah II Makmur, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu. Peta lokasi Penelitian dapat dilihat pada Gambar 2, dan nama LPKD masing-masing desa pada Tabel 1.



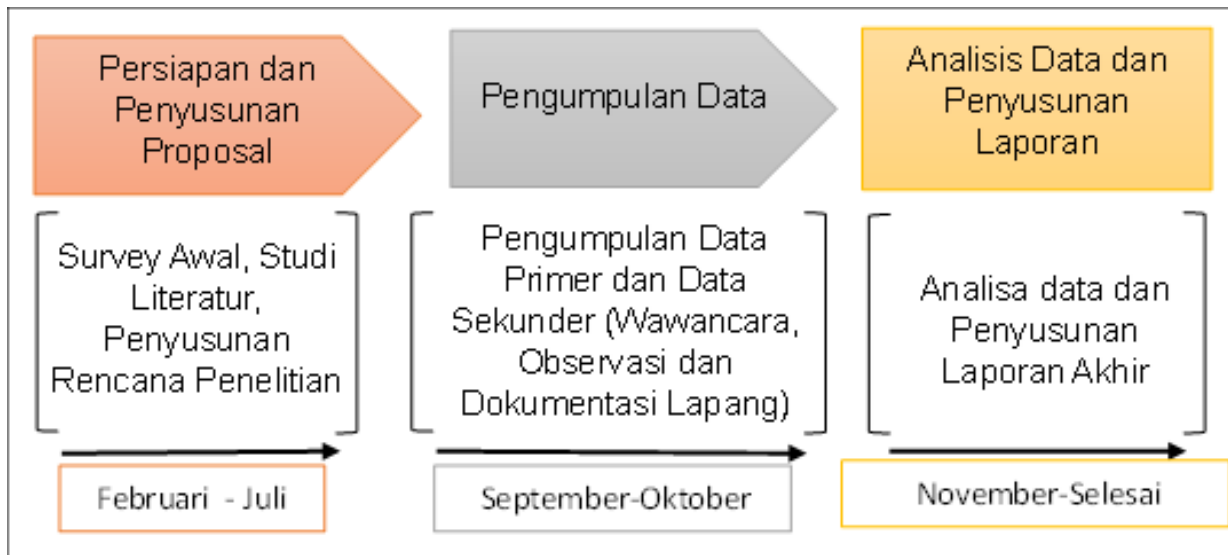
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

Tabel 1. Studi Kasus tiga desa penyangga di BPTN Wilayah II Makmur

No	Desa	Nama LPKD	Seksi Wilayah Pengelolaan
1.	Bobo	Saluntolondo	SPTN Wilayah IV Bora
2.	Bunga	Bunga	SPTN Wilayah IV Bora
3.	Karunia	Mosipatuvu	SPTN Wilayah III Tongoa

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga September 2023, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut: persiapan dan penyusunan proposal meliputi survey/observasi awal, studi lapangan (meliputi pengumpulan data baik berupa data primer (observasi dan dokumentasi lapangan) dan data sekunder, kemudian pada tahap analisis data dan penyusunan laporan akhir tesis. Berdasarkan tahapan penelitian dijabarkan pada Gambar 3:





Gambar 3. Alur Penelitian

2.2. Teknik Pengumpulan Data

2.2.1. Menganalisis kondisi terkini pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan konservasi

Untuk menganalisis kondisi terkini pengelolaan kemitraan konservasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, maka perlu melihat perubahan perilaku masyarakat, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan yang ada sekarang, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang sesuai ditemukan dilapangan (Narbuko dan Achmadi, 2013). Dalam menganalisis kondisi terkini pemberdayaan masyarakat juga dapat diarahkan untuk mencari strategi yang tepat agar tujuan pemberdayaan tercapai. Untuk mengetahui kondisi pemberdayaan masyarakat dilokasi penelitian perlu melakukan wawancara dan diskusi mendalam terhadap masyarakat dan pihak terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap awal masing-masing variabel diidentifikasi berdasarkan isu pemberdayaan dan kondisi sekarang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kemitraan konservasi di TNLL, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi sekarang pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi

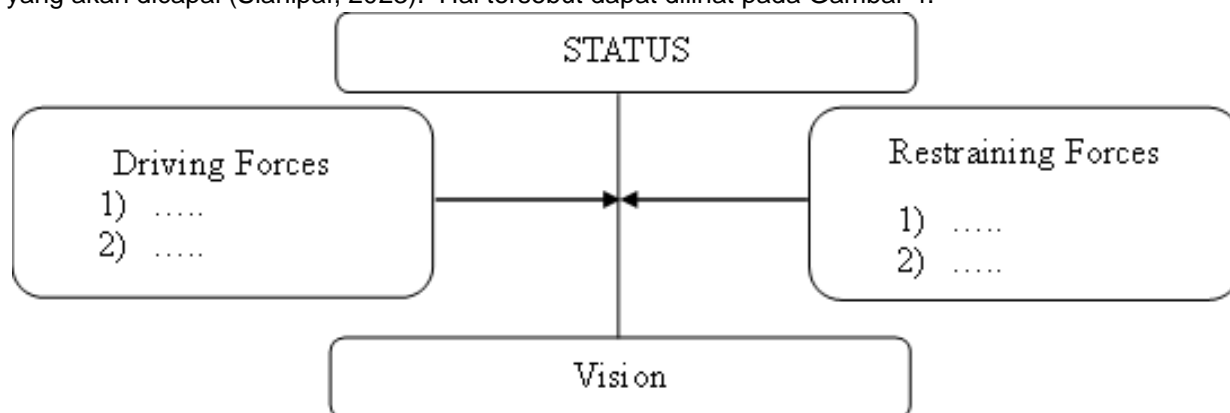
Variabel	Isu Pemberdayaan	Intervensi Program	Kondisi Sekarang
Aspek Kelembagaan			
Aspek Peningkatan Kapasitas SDM			
Aspek Implementasi Kegiatan			
Aspek Kemitraan			
Aspek Monitoring dan Evaluasi			



5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Kemitraan Konservasi dan Strategi pengembangan Pemberdayaan Masyarakat melalui skema kemitraan

ata terkait kondisi terkini pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan nya dilakukan identifikasi mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat an konservasi. Pengolahan data dilakukan dengan metode Force Field Analysis

(FFA) dan Analytic Hierarchy Process (AHP). FFA bertujuan untuk menguraikan suatu rencana perubahan strategis dan mengkaji seperti apa tindakan-tindakan strategis yang layak. Melalui FFA semua faktor pendorong (*driving forces*) dan faktor penghambat (*restraining forces*) suatu keputusan akan dapat dilihat. Hasil analisis ini juga akan membentuk sebuah alternatif yang berfokus dalam meminimalisir faktor penghambat dengan mengedepankan faktor yang akan menjadi kekuatan kunci ke arah tujuan yang akan dicapai (Sianipar, 2023). Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Bagan Force Field Analysis

Inventarisasi semua faktor pendorong dan penghambat pengelolaan kemitraan konservasi di TNLL, disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Inventarisasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan kemitraan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat

Variabel	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Aspek Kelembagaan		
Aspek Peningkatan Kapasitas SDM		
Aspek Implementasi Kegiatan		
Aspek Kemitraan		
Aspek Monitoring dan Evaluasi		

Hasil yang dicapai dari analisis FFA adalah berupa alternatif-alternatif yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang selanjutnya dibuat suatu cara (*ways*) menunjuk pada tindakan yang jelas dengan operasional. Adapun bentuk pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam bentuk *ways* disajikan pada Tabel 4.

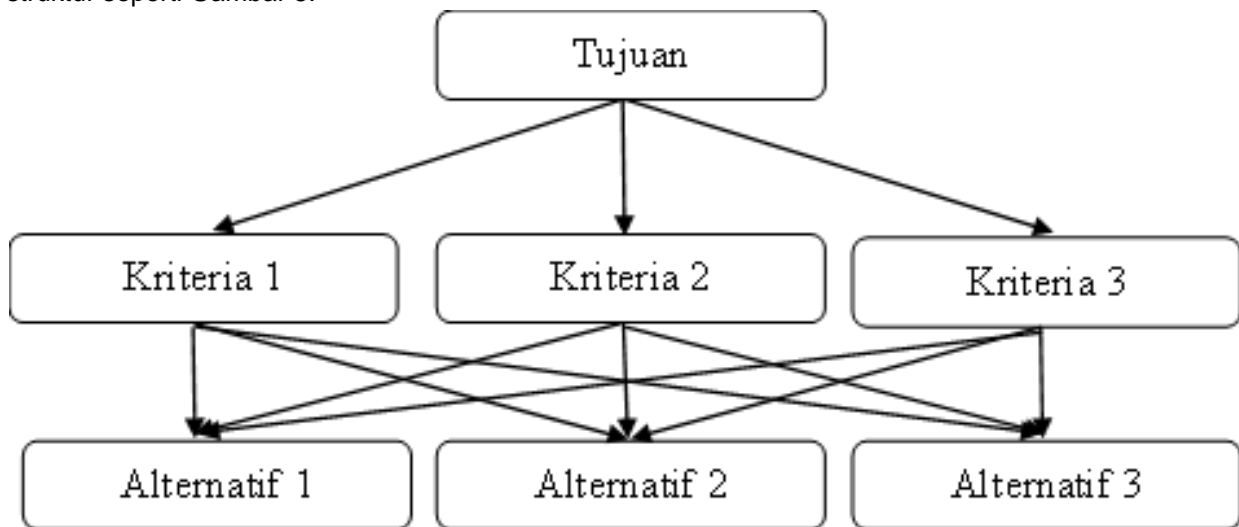
Tabel 4. Cara memperkuat faktor pendorong dan menghambat faktor penghambat pengelolaan kemitraan konservasi

Variabel	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Alternatif (<i>Ways</i>)
Aspek Kelembagaan			
Aspek Peningkatan Kapasitas SDM			
Aspek Implementasi Kegiatan			
Aspek Kemitraan			
in Evaluasi			



ways yang sesuai, kemudian dilakukan indentifikasi kekuatan-kekuatan yang paling pencapaian tujuan dengan menggunakan skala 1-5 yang kemudian menjadi unsur-
 < menjadi sebuah hierarki proses pengambilan keputusan, dimana setiap unsur-
 ubungan. Tiga komponen utama dalam membentuk hierarki yaitu tujuan yang ingin

dicapai dari pengambilan keputusan, kriteria penilaian dan alternatif pilihan yang disusun dalam suatu struktur seperti Gambar 5.



Gambar 5. Hierarki Keputusan AHP

Setelah terbentuk struktur hierarki, kemudian dilakukan identifikasi kekuatan-kekuatan yang paling penting dalam upaya pencapaian tujuan melalui matriks perbandingan berpasangan. Penilaian tersebut diberikan kepada pakar (*ekspert*). Selanjutnya tersaji dalam uraian berikut:

1. Membuat matriks perbandingan berpasangan (matriks pairwise comparison) yang menggambarkan kontribusi relative atau pengaruh setiap faktor terhadap masing-masing tujuan/isu. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan dari pakar dengan menilai tingkat kepentingan satu faktor dibandingkan faktor lainnya. Skala penilaian yang disebut skala AHP, dikembangkan oleh Saaty dan dipaparkan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1980. Skala penilaian tersebut disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Skala Saaty (1980)

Intensitas Kepentingan	Definisi
1	Kedua faktor sama pentingnya.
3	Faktor yang satu sedikit lebih penting dari pada yang lainnya.
5	Faktor yang satu esensial atau sangat penting dari pada faktor yang lainnya.
7	Satu faktor jelas lebih penting dari pada faktor yang lainnya
9	Satu faktor sangat penting dari pada faktor lainnya
2, 4, 6, 8	Nilai-nilai tengah diantara dua pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan	Jika untuk aktivasi i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan satu aktivitas j , maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan aktivitas i .

2. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap faktor didalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.
3. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data (w_i) harus diulangi.



langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.

menyebutkan vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai eigen vektor dari setiap faktor. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas di tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan.

metode konsistensi hirarki dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak dianggap eror

CR = 0, maka dianggap sangat konsisten

CR > 0-1, maka dianggap konsisten

CR > 1, maka dianggap tidak konsisten

Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka penilaian harus diulangi kembali.

Rasio konsistensi merupakan batas ketidak konsistenan (*inconsistency*) yang ditetapkan Saaty. Rasio konsistensi dirumuskan sebagai perbandingan indeks konsistensi dengan nilai pembangkit random yang disajikan pada tabel dibawah. Nilai tersebut bergantung pada ordo matriks n (Tabel 6). Dengan demikian, Rasio Konsistenan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CR = CI/IR$$

Ket: CR : Consistency Ratio

CI : Consistency Index

RI : Indeks Random Consistency

Tabel 6. Nilai Pembangkit Random (RI)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.I	0	0	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

- Setelah dilakukan uji konsistensi pada setiap pakar, selanjutnya dilakukan analisis gabungan seluruh pakar untuk menyeragamkan isu dan melunturkan subjektive dari pakar
- Setelah diperoleh nilai dari hasil analisis pakar, selanjutnya dapat dirumuskan strategi-strategi dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kegiatan pengelolaan kemitraan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

2.3. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2018), triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dan dianalisis meliputi data primer dan data sekunder.

2.3.1. Data Primer

1. Observasi

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian dan mencari informasi mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan konservasi yang kemudian akan menjadi informasi awal dalam merencanakan tahapan wawancara yang dilakukan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan fakta di lapangan terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kemitraan konservasi, dilakukan observasi partisipan yang dikombinasikan dengan observasi non-partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti ikut serta langsung dalam berbagai kegiatan, seperti mendampingi masyarakat di lapangan dan berpartisipasi dalam pelatihan serta pertemuan kelompok yang terlibat dalam pengelolaan. Sementara itu, dalam observasi non-partisipan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak untuk mendapatkan informasi tentang siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan kemitraan konservasi. Wawancara awal dilakukan dengan pihak BBTNLL dan BPTN Wilayah II Makmur, yang kemudian dijadikan dasar untuk pengumpulan data wawancara dengan narasumber lainnya.



akan dengan narasumber atau informan yang memiliki kemampuan, pengetahuan, tentang setiap proses kemitraan konservasi di kawasan hutan TNLL. Hal ini sesuai atau persyaratan dalam penelitian kualitatif, yaitu pemilihan narasumber harus kesesuaian. Penentuan narasumber adalah aspek utama dalam penelitian kualitatif. i, pemilihan narasumber dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu melalui

pendekatan analisis pemangku kepentingan yang sudah dilakukan pada tahap survei/observasi awal (tahap persiapan/perencanaan).

Dalam penelitian ini, jumlah narasumber ditentukan oleh peneliti sesuai dengan pendekatan purposeful sampling, yang merujuk pada pemilihan kasus yang informatif berdasarkan strategi dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Hal ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, kebutuhan akan data, dan ketersediaan sumberdaya, sebagaimana dijelaskan oleh Patton (2002). Berdasarkan hasil observasi, narasumber dalam penelitian ini termasuk masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kemitraan konservasi, pemerintah desa, lembaga pendamping (LPKD dan Pelaksana Forest Program III), serta pihak pengelola TNLL. Mereka mewakili berbagai peran dalam pengelolaan kemitraan konservasi di TNLL.

Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur, dengan menyusun instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saat melakukan wawancara, informasi yang dikumpulkan mencakup:

- a. Penguatan kelembagaan mencakup pembentukan kelompok kemitraan konservasi serta penyusunan rencana pengelolaan bersama.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia meliputi partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan serta program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
- c. Implementasi kegiatan mengacu pada seberapa efektif kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan kemitraan konservasi dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap kawasan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Kemitraan mencakup pembentukan unit usaha dalam memanfaatkan sumber daya hutan serta keterlibatan mitra dalam meningkatkan hasil produksi masyarakat.
- e. Monitoring dan evaluasi mencakup pelaksanaan pemantauan untuk menilai sejauh mana keberhasilan kegiatan dan ketersediaan dokumentasi serta laporan.

Pelaksanaan Wawancara dilapangan:

- a. Peneliti menjelaskan dengan jelas dan sederhana maksud, tujuan, dan hasil yang diharapkan dari wawancara kepada responden.
- b. Peneliti memberikan contoh yang sederhana dan mudah dimengerti terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber agar lebih mudah dipahami.
- c. Point penting yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam wawancara adalah bagaimana penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan SDM, pemanfaatan SDH dan pengembangan usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, dan bagaimana pelestarian kawasan dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi lapangan digunakan untuk menggambarkan kondisi dan situasi lokasi pengamatan kedalam bentuk foto, sehingga dapat memberikan informasi secara visual kondisi dan situasi lokasi penelitian.

2.3.2. Data Sekunder

Data sekunder mencakup informasi mengenai kondisi umum lokasi penelitian, data demografi penduduk, struktur lembaga konservasi desa, serta dokumen perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi terkait pengelolaan kemitraan konservasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Data ini diperoleh dari beberapa pihak, termasuk Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD), Pelaksana FP3, BBTNLL, serta berbagai laporan terkait.



Penelitian

berfokus pada bentuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar area bel dan indikator yang akan digunakan untuk mengukur pemberdayaan masyarakat kemitraan konservasi tersebut disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Variabel dan indikator penelitian pengelolaan kemitraan konservasi

Nama Program	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian
Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan kemitraan konservasi	Aspek Kelembagaan	Legalitas
		Pemahaman tentang fungsi organisasi
		Pemahaman tentang Kewenangan dan Tanggung jawab
		Partisipasi
	Aspek Peningkatan Kapasitas SDM	Terlaksananya pelatihan pengembangan keterampilan kepada masyarakat
		Penguatan kapasitas
	Aspek Implementasi Kegiatan	Pemanfaatan sumber daya
		Pelestarian Kawasan
		Pengembangan usaha
	Aspek Kemitraan	Terbentuknya Unit Usaha pemanfaatan SDH yang dikembangkan
		Kerja sama pemanfaatan sumber daya hutan pengembangan produk
		Adanya mitra yang bekerja sama dalam pemasaran produk
	Aspek Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan Monitoring Kegiatan
Ketersediaan dokumen laporan kegiatan		

Unit amatan dalam penelitian ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kemitraan konservasi yang dilakukan oleh kelompok mitra konservasi TNLL bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Hasil dari pemetaan stakeholder menunjukkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam program kemitraan konservasi, seperti masyarakat dalam kelompok mitra konservasi, pemerintah desa, lembaga pendamping (LPKD dan Pelaksana Forest Program III), dan pengelola TNLL.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah cara pandang atau persepsi dari berbagai pihak terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kemitraan konservasi sebagai bentuk pengelolaan kolaboratif, serta evaluasi efektivitasnya dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

